

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tax ratio**

Penerimaan pajak sangatlah penting untuk negara manapun di dunia. Tujuan utama dari perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka membiayai barang dan jasa publik. Nalyanya et al.(2020) menyebutkan negara yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai akan mampu menekan defisit anggaran yang tercermin dari berkurang pinjaman kepada pihak luar. Kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan potensi pajak yang ada dalam perekonominya dapat kita lihat pada *tax to GDP ratio* negara tersebut.

*Tax ratio* merupakan suatu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengetahui besaran porsi pajak dalam perekonomian suatu negara dan seberapa baik pemerintah mengatur sumber daya ekonomi suatu negara. Dalam menghitung *tax ratio* setiap negara memiliki caranya masing-masing dengan dilihat dari komponen penerimaan pajaknya. Namun dalam menghitung rasio tersebut tetap berpedoman pada *International Monetary Fund* (IMF) atau OECD.

IMF menggunakan komponen penerimaan pajak pusat , penerimaan negara dari SDA hingga pajak daerah. Sedangkan OECD menggunakan komponen secara luas dengan menambahkan kontribusi jaminan social menjadi salah satu komponen dalam menghitung *tax ratio*.

Tinggi rendahnya *tax ratio* di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa elemen tertentu. UI-Isalm & Siddique (2017) meneliti bagaimana variabel-variabel makro ekonomi dan sosial ekonomi berpengaruh pada *tax ratio* di berbagai negara. Mereka menggunakan 27 negara sebagai sampel yang dipilih secara acak dari negara-negara dengan berpendapatan tinggi dan rendah, yang didominasi oleh negara-negara berpendapatan rendah. Dalam penelitian ini, *trade openness*, *capital inflow*, *tax base* dan korupsi berubungan dengan *tax ratio*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *trade openness* dan *income per capita* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio*. Ketika terdapat perubahan 1 persen pada perdagangan, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 4 persen pada *tax ratio*. Negara-negara yang membuka perbatasan mereka untuk melakukan perdagangan dengan negara lain memiliki keuntungan lebih dalam hal penerimaan pajak. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bahwa elemen lainnya seperti *tax base* memiliki hubungan positif dengan *tax ratio* walaupun tidak signifikan *income per capita*

Gupta (2007) menelusuri bagaimana kinerja penerimaan dari kumpulan negara berkembang dalam 25 tahun belakangan. Studi ini menemukan bahwa beberapa faktor structural seperti *GDP per capita* dan *trade openness* signifikan secara statistic dengan kinerja penerimaan negara-negara tersebut. Studi ini juga

mengkaji bagaimana variabel seperti korupsi dan stabilitas politik berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## **2.2 Pengaruh Variabel-Variabel Ekonomi Makro terhadap Tax ratio**

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang bagaimana pengaruh variabel-variabel makro ekonomi terhadap *tax ratio* di berbagai negara di belahan dunia, diantaranya :

Gaalya et al.(2017) dalam studinya mencoba menentukan efek dari *trade openness* pada kategori pajak yang berbeda-beda di negara-negara Afrika Timur yang membuka perbatasan negaranya untuk melakukan perdagangan. Rata-rata tingkat tarif digunakan sebagai ukuran untuk *trade openness*. Hasilnya menunjukkan bahwa *trade openness* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap total penerimaan pajak, pajak tidak langsung, pajak perdagangan, tetapi tidak signifikan terhadap pajak langsung. Tidak hanya itu, variabel lainnya seperti *GDP per capita* dan kontrol terhadap korupsi memiliki dampak positif terhadap perpajakan di negara-negara East African Country (EAC). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, Ebrill et al.(1999) dan Agbeyegbe et al.(2006) yang menemukan bahwa *trade openness* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Egwakhe et al. ( 2018) dalam studinya meneliti tentang efek *trade openness* terhadap kinerja penerimaan pajak di Nigeria (1987-2016). Dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS) regression analysis*, mereka menemukan kesimpulan bahwa *trade openness* memiliki efek negatif dan signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak di Nigeria. Tentu hasil ini berbeda dengan berbagai literatur yang telah ada sebelumnya.

Namun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa selama periode penelitian ini, tarif bea masuk di Nigeria termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Tingginya tarif ini berkontribusi terhadap turunnya penerimaan pajak di Nigeria. Studi ini kemudian merekomendasikan kegiatan berorientasi ekspor dan diversifikasi ekonomi menjadi fokus pemerintah dengan harapan lebih banyak pendapatan dari pajak yang mampu diperoleh oleh Nigeria.

Guo (2013) dalam studinya menerangkan bagaimana pemerintah China berhasil mengimplementasikan liberalisasi perdagangan dan meningkatkan penerimaan tarif secara bersamaan pada tahun 1990 an. Kasus di China ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-penyelundupan yang efektif mampu meningkatkan penerimaan tarif atau bahkan mengimbangi kerugian dalam sektor penerimaan pajak akibat liberalisasi perdagangan. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang, kinerja agregat dari perekonomian terbuka lebih baik dibandingkan yang tertutup. Tetapi para ekonom juga khawatir bahwa pada jangka pendek, liberalisasi perdagangan akan membahayakan penerimaan pemerintah. Studi ini menunjukkan bagaimana China mampu lepas dari dilema ini.

Nalyanya et al. (2020) dalam studinya tentang keterkaitan antara tingkat inflasi dengan kinerja penerimaan pajak di Kenya menemukan bahwa inflasi berkorelasi negatif dengan *tax ratio*. Inflasi sendiri merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berakibat pada menurunnya daya beli per unit uang. Inflasi biasanya diukur dengan *Costumer Price Index (CPI)*. Model yang digunakan dalam studi ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% akan

menurunkan penerimaan pajak sebesar 18,3 %. Meningkatnya inflasi di Kenya selama bertahun-tahun memperuhi penerimaan pajaknya sehingga penting agar pemerintah dengan bantuan Bank Sentral untuk memastikan inflasi berada pada tingkatan yang aman.

Efek dari inflasi terhadap penerimaan pajak telah dibahas pada studi terdahulu, Tanzi ( dalam Nalyana et al , 2020:6) menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, yang kemudian dikenal dengan *Olivera-Tanzi Effect*, yaitu kondisi ekonomi yang melibatkan periode inflasi tinggi yang berakibat pada menurunnya volume pemungutan pajak.

Inflasi berhubungan secara langsung dengan penerimaan pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh ekonom Milton Friedman. Beliau berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu inflasi dapat menjadi perwujudan efektif dari penerimaan pajak. Kita dapat melihat ketika tahun 2016 pemerintah Kenya menaikkan tarif cukai atas barang seperti alkohol dan bahan bakar yang menyebabkan tingginya harga barang-barang tersebut (Nalyanya et al. (2020). Kebijakan ini menimbulkan kenaikan inflasi temporer hingga mencapai angka 10% yang secara bersamaan meningkatkan penerimaan pajak karena konsumen terpaksa membayar lebih tinggi atas barang-barang yang dikenai cukai lebih tinggi.

### **2.3 Pengaruh Korupsi terhadap Tax Rasio**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai

penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Korupsi memiliki efek negative terhadap penerimaan pajak suatu negara. IMF (2019) menyatakan bahwa negara-negara yang pemerintahannya terkenal korup memiliki kecenderungan masyarakat untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. IMF menyatakan bahwa secara keseluruhan, negara-negara dengan pemerintahan yang tidak korup mampu memperoleh tax ratio 4% lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang korup dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama.

Telah banyak literatur yang mengangkat mengenai isu tentang bagaimana korupsi mempengaruhi kinerja penerimaan pajak suatu negara. Imam & Jacobs (2014) menemukan bahwa rendahnya penerimaan sebagai bagian dari GDP di negara-negara Timur Tengah disebabkan oleh korupsi. Mereka meneliti bagaimana dampak korupsi di beberapa jenis pajak yang dipungut. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak yang menghasilkan interaksi yang intense antara petugas pajak dan wajib pajak terdampak sangat signifikan dengan adanya korupsi. Sehingga menurut penelitian ini, pemerintah harus menekan tingkat korupsi atau memfokuskan pendapat dari kategori pajak yang tidak rentan terhadap korupsi ketika ingin meningkatkan penerimaan pajaknya. Ajaz & Ahmad (2010) dan Abed & Gupta (2002) juga menemukan bukti bahwa korupsi dapat menurunkan penerimaan pajak suatu negara.

Negara-negara berkembang biasanya kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang memadai dalam bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah kelembagaan pada proses memungut penerimaan pajak dari

masyarakat. Salah satu masalah terbesar pada proses ini adalah tindakan korupsi pada administrasi perpajakan. Brondolo et al ( dalam Ajaz & Ahmad, 2010:1) mengatakan bahwa administrasi perpajakan dan sistem perpajakan merupakan dua komponen utama dalam menghasilkan pendapatan di bidang perpajakan. Tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dari administrasi perpajakan agar korupsi dapat diminimalisir. Penyederhanaan sistem perpajakan juga bisa menjadi jalan untung mengurangi peluang terjadinya korupsi.

#### **2.4 Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel penentu dari *tax ratio* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis menetapkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1: *Income Per Capita* berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* negara-negara ASEAN

H2: *Inflation Rate* berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* negara-negara ASEAN

H3: *Trade Openess* berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* negara-negara ASEAN

H4: *Korupsi* berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio* negara-negara ASEAN